



ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM
KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KINERJA TA 2021

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

Versi 3.0 (13/04/2022 13.04)

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membantu tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi terkait pencapaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang transparan dan akuntabel. Penyusunan LKj berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024. Selama tahun 2021, secara umum Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dapat mencapai sasaran strategis dengan baik di tengah pandemi Covid-19 meskipun terdapat tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan masukan dalam pelaksanaan kinerja agar dapat meningkatkan kinerja yang akuntabel di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Maret 2022
Asisten Deputi Bidang Perhubungan
dan Pekerjaan Umum,



Hennie Ambar Susilowati

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Gambar.....	3
Daftar Tabel.....	4
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Aspek Strategis	5
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Treats (SWOT)	10
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Rencana Kerja dan Anggaran	15
C. Uraian Perjanjian Kerja	19
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja.....	21
B. Realisasi Anggaran	31
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
Formulir <i>Checklist</i> Muatan Substansi Laporan Kinerja Sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018.....	34

Daftar Gambar

Gambar 1 : Hasil Tangkapan Layar Dashboard SIKT v2.0 Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2021	23
Gambar 2 : Rekapitulasi Capaian Kinerja per Bulan	26
Gambar 3 : Rekapitulasi Jumlah Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	26
Gambar 4 : Tren Persentase Realisasi Anggaran	31

Daftar Tabel

Tabel 1 : Tabel Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.....	7
Tabel 2 : Daftar Nama Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang Mengalami Perubahan Jabatan	9
Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2020-2024	14
Tabel 4 : Tabel Uraian Target Kinerja dan Pendanaan TA 2021	15
Tabel 5 : Rincian Anggaran Sesuai Rencana Strategis dan DIPA TA 2021	18
Tabel 6 : Tabel Pagu Anggaran TA 2021	19
Tabel 7 : Perjanjian Kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2021	20
Tabel 8 : Matriks Capaian Kinerja TA 2021	21
Tabel 9 : Rekapitulasi Dokumen Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2021	24
Tabel 10 : Isu/Permasalahan yang Ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2021	28
Tabel 11 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja¹ merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan kinerja tahunan yang disiapkan oleh masing-masing satuan kerja akan menjadi dasar bagi penyusunan laporan kinerja tahunan bagi unit organisasi. Laporan kinerja tahunan berisi ringkasan dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen APBN. Dalam penyusunannya, laporan kinerja tahunan menyajikan informasi:

- a. Uraian singkat organisasi;
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja tahunan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berisikan capaian kinerja (*output*, *outcome*, dan penggunaan anggaran) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2021 dan juga perbandingan capaian selama kurun waktu 2022 serta target pencapaian masa Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada satu tahun masa pemerintahan.

B. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan unit kerja Eselon II dibawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang memiliki tanggungjawab untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan

¹ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Berlandaskan hal tersebut diatas, mengingat posisi yang strategis tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memiliki andil dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada pimpinan. Gambaran lebih detail terkait aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 1 : Tabel Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Aspek Strategis	Berdasarkan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024
Visi	Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang adaptif, inovatif, dan profesional dalam membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi kinerja seluruh pejabat dan staf berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diukur beban kerja masing-masing pejabat dan staf; 2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain seperti pembangunan <i>database</i> internal; 3. Meningkatkan koordinasi dan <i>networking</i> khususnya dengan K/L mitra utama dan K/L pendukung dan pemerintah daerah dengan variasi tingkatan yang beragam; serta 4. Mengutamakan koordinasi yang baik dan lancar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keasdepan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum 2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang untuk masing-masing sektor perhubungan, yaitu **bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, bidang perhubungan laut dan udara, dan bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman**. Para Kepala Bidang juga didukung oleh Kepala Subbidang pada sektor khusus dan analisis substansi (dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum hanya memiliki Analisis Perekonomian saja). Guna pelaksanaan fungsi administrasi, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dibantu oleh seorang staf tata usaha.

Pada tahun 2021, di lingkungan Sekretariat Kabinet telah dilakukan rotasi jabatan khususnya untuk pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV. Rotasi tersebut dilakukan untuk mengisi beberapa posisi yang kosong dan juga dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Tabel 2 : Daftar Nama Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang Mengalami Perubahan Jabatan

No.	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT Jabatan
1	Lidya Grace, S.H., LL.M.	197211142002122001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran, Deputi Bidang Perekonomian	Kepala Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	28 September 2021
2	Manda Kumoro Saraswati, S.E.	199102052015022001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perekonomian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kepala Subbidang Perhubungan Udara, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	
3	Muhammad Eky Marzuki, S.E.	198902092015021001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perekonomian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kepala Subbidang Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	
4	Ega Julaeha, S.AP.	198605302005012001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Pengembangan Iklim Usaha, Deputi Bidang Perekonomian	Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	
5	Rojat, S.Sos., M.H.	196806111995031001	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kepala Subbidang Industri Nonsektoral, Deputi Bidang Perekonomian	

D. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Treats (SWOT)

Pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum terus berkembang sebagai sebuah unit kerja. Pengembangan diri tersebut didukung dengan analisis SWOT yang dapat membantu pengembangan kedepannya. Beberapa analisis SWOT berdasarkan Rencana Strategis yang dikaitkan dengan kondisi eksisting:

D.1. Potensi

- a. Kedudukan dan peran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang strategis

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan unit kerja di Sekretariat Kabinet yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet khususnya yang terkait dengan bidang perhubungan dan pekerjaan umum. Dengan adanya target RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan konektivitas menjadikan keberadaan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai peran yang strategis dan potensi tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- b. Adanya kemampuan adaptasi yang tinggi

Tahun 2021 menjadi tahun kedua Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mendapat tanggungjawab menangani sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perubahan yang fundamental yang diikuti dengan menunjukkan kemampuan adaptasi dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam menjalankan dinamika perubahan tugas dan fungsi termasuk dalam mengkoordinasikan dan pemberian rekomendasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Menteri di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak terhadap masyarakat yang perlu mendapatkan persetujuan dari Presiden

D.2. Kelemahan

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi

Sebagai sebuah unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berusaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, hal tersebut membutuhkan peran aktif seluruh pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan teknologi informasi.

D.3. Peluang

a. Adanya kemauan untuk melaksanakan inovasi

Meskipun pemanfaatan teknologi dan informasi masih terbilang rendah, namun terdapat kesadaran akan kebutuhan teknologi dan informasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat dan pegawai menjadi sebuah peluang. Selain itu, adanya keinginan untuk membangun teknologi informasi yang dimanfaatkan secara internal menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi.

b. Kolaborasi dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memiliki posisi strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Hal tersebut akan berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal melalui kolaborasi dengan mitra kerja khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara umum. Kolaborasi tersebut tidak hanya diwujudkan dalam rapat koordinasi saja, akan tetapi juga dengan membangun jejaring dan kerjasama dalam berbagi data dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

D.4. Tantangan

a. Perlunya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga

Sebagai salah satu unit kerja dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga yang baru, dibutuhkan koordinasi, sinergi,

dan kolaborasi yang cepat sehingga memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Kebutuhan akan informasi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan

Dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk Presiden dan Wakil Presiden, harus didasarkan pada data dan informasi yang faktual, terbaru, dan valid. Data dan informasi tersebut antara lain dapat diperoleh melalui rapat koordinasi dan pemantauan. Akan tetapi, mengingat dinamika pekerjaan yang cukup tinggi, tidak jarang Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membutuhkan data dan informasi yang terbaru dalam waktu yang terbatas guna menjadi data dukung dalam penyusunan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu diperlukan kesiapan untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat tersebut dengan waktu yang terbatas serta data-data dan informasi yang diperoleh secara cepat dan tepat.

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai unit kerja Eselon II di bawah pimpinan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional² antara lain mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2020-2024 disusun berpedoman dan diarahkan untuk mendukung perwujudan visi Presiden, 7 (tujuh) misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Indonesia Maju yang kemudian dikenal dengan “Nawacita”.

Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan serta lebih menitikberatkan pada hasil daripada kegiatan administrasi dan output.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2020-2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, terdapat beberapa target kinerja dan anggaran yang direncanakan khususnya pada tahun 2021.

Tabel 4 : Tabel Uraian Target Kinerja dan Pendanaan TA 2021

Uraian	Target Kinerja	Target Pendanaan
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		720.000.000
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)		720.000.000
Kegiatan 1		
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)		574.213.000

Uraian	Target Kinerja	Target Pendanaan
Sasaran Kegiatan 1		
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi		574.213.000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1		
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	
KRO 1		
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	27 rekomendasi kebijakan	574.213.000
RO 1		
001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	27 rekomendasi kebijakan	574.213.000
Indikator RO 1		
<i>Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	27 rekomendasi kebijakan	
Komponen		
507 a. Pengumpulan Data	30 Laporan	232.676.000
508 b. Analisis penyusunan rekomendasi	10 Laporan	341.537.000
509 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0 Laporan	0
Kegiatan 2		
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)		145.787.000

Uraian	Target Kinerja	Target Pendanaan
Sasaran Kegiatan 2		
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi		145.787.000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2		
1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	
2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	
KRO 2		
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8 rekomendasi kebijakan	145.787.000
RO 2		
001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	8 rekomendasi kebijakan	145.787.000
Indikator RO 2		
Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	8 rekomendasi kebijakan	
Komponen		
519 a. Pengumpulan Data	12 laporan	121.662.000
520 b. Analisis penyusunan rekomendasi	1 laporan	24.125.000
521 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0 Laporan	0

Berdasarkan dokumen tersebut dan Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2021, terdapat perubahan besaran anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 5 : Rincian Anggaran Sesuai Rencana Strategis dan DIPA TA 2021

No.	Rincian Output	Anggaran Sesuai Rencana Strategis	Anggaran Sesuai DIPA TA 2021	Perubahan
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp574.213.000,00	Rp650.998.000,00	+13,3%
2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp145.787.000,00	Rp149.002.000,00	+2,21%
TOTAL		Rp720.000.000,00	Rp800.000.000,00	+11,11%

Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah beberapa kali mengajukan revisi anggaran. Revisi tersebut dilakukan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran kementerian/lembaga guna menangani pandemi COVID-19 tersebut. Adapun besaran anggaran setiap kegiatan setelah dilakukan revisi adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Tabel Pagu Anggaran TA 2021

No.	Rincian Output	Anggaran Sesuai DIPA TA 2021	Anggaran Setelah Revisi dan <i>Refocusing</i>	Perubahan
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp650.998.000,00	Rp485.878.000,00	-25,36%
2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp149.002.000,00	Rp67.075.000,00	-54,99%
TOTAL		Rp800.000.000,00	Rp552.953.000,00	-30,89%

C. Uraian Perjanjian Kerja

Penetapan perjanjian kinerja ditujukan kepada setiap unit organisasi agar dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian-capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target tertentu, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tabel 7 : Perjanjian Kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	Rp650.998.000,00
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	Rp149.002.000,00
	4. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Tabel 8 : Matriks Capaian Kinerja TA 2021

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)					
Kegiatan	1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)					
Sasaran Kegiatan	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi					
Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	89,47 %	98,32 %	Rp552.953.000,00	Rp547.388.772,00	98,99%
2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan	91 %	100 %	109,89 %			

Program	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)					
Kegiatan	1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407) 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)					
Sasaran Kegiatan	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi					
Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet						
3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	100 %	109,89 %			
4. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 %	100 %	109,89 %			

Pada tahun 2021 capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum rata-rata mencapai nilai 106,9%. Hal tersebut menandakan bahwa pada tahun 2021, sebagian rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah disetujui serta telah disampaikan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga terkait.



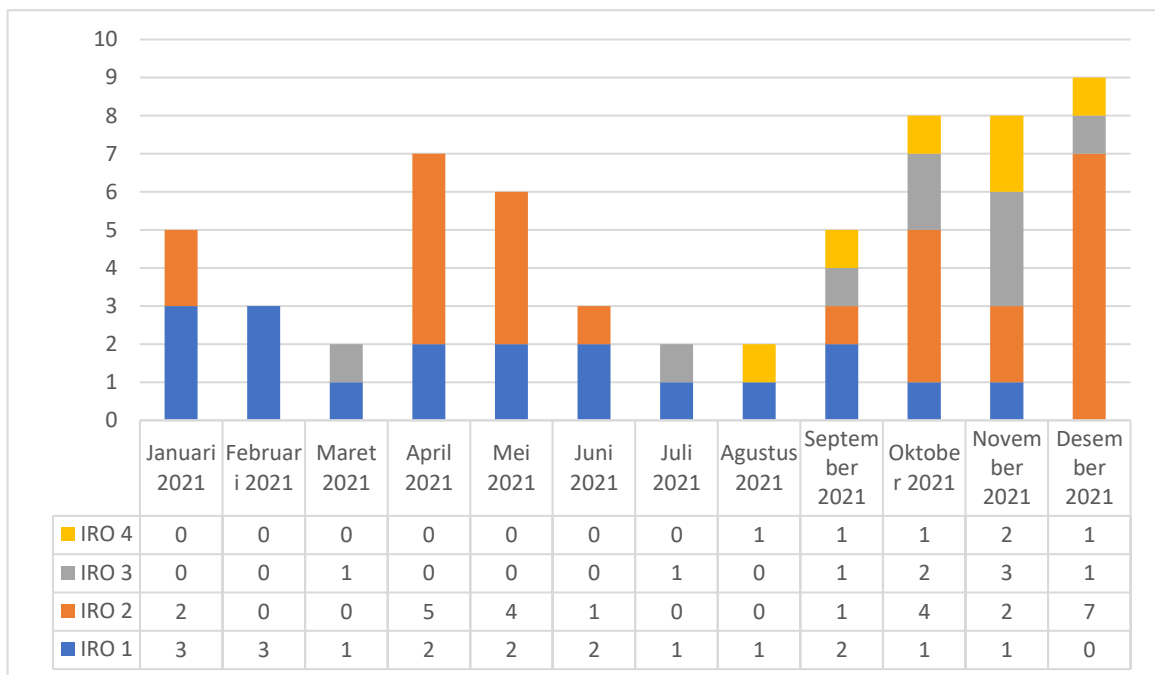
Gambar 1 : Hasil Tangkapan Layar Dashboard SIKT v2.0 Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2021

Tabel 9 : Rekapitulasi Dokumen Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2021

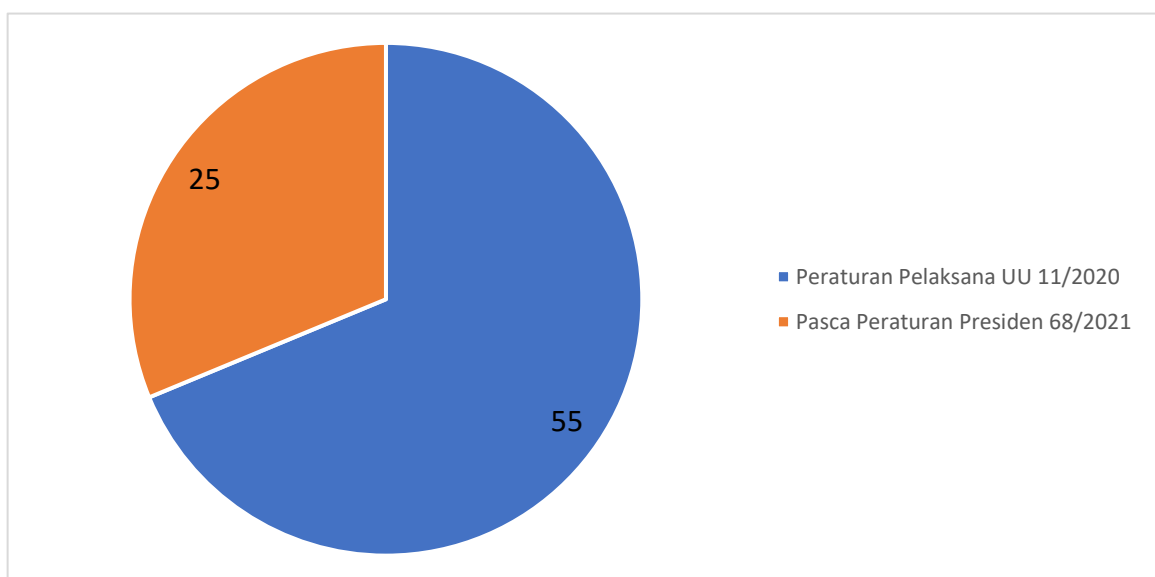
Indikator Rincian Output (IRO)		Q4-2020			TA 2021			
		Target Outcome	Realisasi Outcome	Persentase Terhadap Outcome	Target Output	Realisasi Output	Realisasi Outcome	Persentase Terhadap Outcome
1	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,1%	20	19	89%	98,32%
2	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,1%	7	26	100%	109,89%
3	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	90%	100%	111,1%	5	4	100%	109,89%

Indikator Rincian Output (IRO)		Q4-2020			TA 2021			
		Target Outcome	Realisasi Outcome	Persentase Terhadap Outcome	Target Output	Realisasi Output	Realisasi Outcome	Persentase Terhadap Outcome
	di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet							
4	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,1%	3	6	100%	109,89%
Total Dokumen					35	55		

Mayoritas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum TA 2021 terkait dengan rekomendasi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan Presiden, dimana pada tahun 2021 banyak Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang terkait dengan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada IRO 1, target dokumen tidak tercapai mengingat pada tahun 2021 fokus Pemerintah masih terkait penanganan pandemi COVID-19, sehingga tidak ada kebijakan baru terkait sektor perhubungan dan pekerjaan umum.



Gambar 2 : Rekapitulasi Capaian Kinerja per Bulan



Gambar 3 : Rekapitulasi Jumlah Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Jika dilakukan perbandingan untuk masing-masing indikator per bulan pada tahun 2021, terlihat pada bulan Q2-2021 dan Q4-2021 capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagian besar terkait rekomendasi persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Pada tahun 2021, 26 rekomendasi dari 55 rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum terkait dengan persetujuan Presiden terkait Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Seperti disajikan pada Gambar dibawah, pada tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum telah memproses 55 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum sebagai peraturan pelaksana UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang membutuhkan persetujuan Presiden. Di tahun 2021 juga terbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, dimana Peraturan Presiden tersebut menguatkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi rencana kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden. Beberapa isu yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 2021, antara lain:

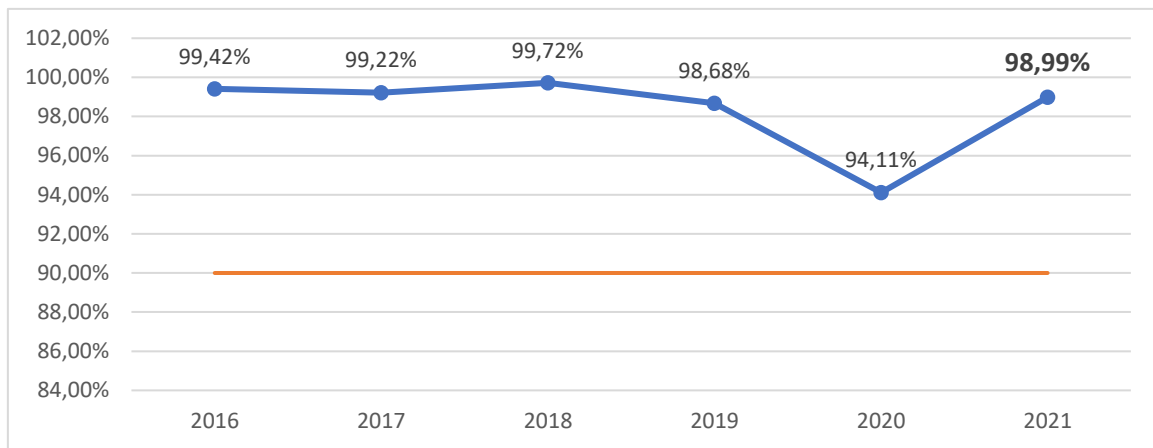
Tabel 10 : Isu/Permasalahan yang Ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No.	Isu/Permasalahan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		
1	<p>Penyiapan bahan Rapat Terbatas tentang Pengembangan Kawasan Kertajati</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Tol Cisumdawu saat ini masih berproses untuk terkoneksi dengan Bandara Kertajati, yang direncanakan tersambung ke jaringan tol Cisumdawu/Tol Cipali di KM 152 tol Cipali menuju Bandara Kertajati sepanjang 16,1 Km Bandara Internasional Kertajati belum memiliki fasilitas pendukung di sekitar kawasan bandara seperti rumah sakit yang dapat menampung 200 penumpang apabila terjadi emergency serta hotel berbintang untuk peristirahatan cabin crew dan penumpang transit. Dukungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan kawasan sekitar 	<p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan rekomendasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian ATR, agar mempercepat proses pembebasan lahan dan pembangunan tol Cisumdawu sehingga memberikan kemudahan aksesibilitas dari dan menuju Bandara Internasional Kertajati serta Tol Cisumdawu diharapkan menjadi akses penunjang untuk kendaraan logistik menuju Pelabuhan Patimban. Pemerintah Daerah agar memberikan insentif perpajakan serta kemudahan perizinan bagi investor untuk membangun bisnis perhotelan, pusat perbelanjaan, restoran (kuliner) di sekitar bandara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait guna memberikan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Bandara Kertajati. <p>Sebagai tindaklanjut Rapat Terbatas tersebut, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat.</p>
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum		
1	<p>Gubernur Jawa Barat kepada Presiden melalui surat nomor: 969/PUR.11.01/Perek tanggal 18 Februari 2021 menyampaikan permohonan dukungan persetujuan pembangunan akses menuju Kawasan Kertajati Aerocity dari Jalan Tol Cisumdawu yang dibiayai dengan APBN.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada 12 Maret 2021 dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait; Selanjutnya, Sekretariat Kabinet merekomendasikan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan kajian urgensi pembangunan jalan akses dimaksud untuk berikutnya dapat dimuat

No.	Isu/Permasalahan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		<p>dalam RPerpres pengembangan kawasan Jawa Barat yang saat itu sedang disusun.</p> <p>Tindaklanjut rekomendasi tersebut, permohonan pembangunan jalur akses tersebut belum dapat dipenuhi dengan pertimbangan telah dibangun jalur akses menuju Kawasan Kertajati dari Jalan Tol Cipali dan jalur akses Jalan Tol Cisumdawu menuju Jalan Tol Cipali.</p>
<p>Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</p>		
2	<p>a. Prakiraan Musim Kemarau 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puncak musim kemarau di sebagian besar (67,3%) wilayah Indonesia akan terjadi pada bulan Agustus 2021 yaitu di Sumatera Selatan, Lampung bagian utara, Pulau Bangka bagian barat, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Jawa, Kalimantan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat, Sulawesi Tenggara bagian selatan, dan Maluku Utara, Pulau Seram bagian utara, Papua Barat bagian utara, dan Jayapura 2) Wilayah yang akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normalnya yaitu sebagian Aceh, Sumatera Utara, dan Bali, Jambi bagian barat dan timur, Jawa bagian tengah, Jawa Timur bagian tengah dan timur, dan Sulawesi Selatan bagian selatan. 3) Wilayah yang akan memasuki musim kemarau maju dari normalnya yaitu sebagian NTT dan Aceh utara dan timur, Sumatera Utara bagian timur dan selatan, Riau bagian selatan, Sumatera Barat bagian timur, Jambi utara, Jawa Barat bagian selatan, Jawa Timur bagian timur, dan sebagian kecil Sulawesi. <p>b. Prakiraan Musim Hujan 2021/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2022 di sebagian besar (71,3%) wilayah Indonesia, diantaranya yaitu Sumatera bagian selatan, Banten bagian utara, DKI Jakarta, Jawa Barat bagian tengah dan utara, Jawa Tengah, 	<ol style="list-style-type: none"> a. Informasi terkait prakiraan musim kemarau 2021, prakiraan musim hujan 2021/2022, dan perkembangan La Nina 2021/2022 dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan informasi dan kebijakan perencanaan pembangunan. b. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasi agar Informasi dari BMKG tersebut diteruskan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah melalui Menteri Dalam Negeri, guna pengoordinasian lebih lanjut, mengingat informasi tersebut merupakan peringatan dini (<i>early warning</i>) yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, serta dapat menginformasikan kepada masyarakat dan pihak terkait agar senantiasa waspada dan siaga.

No.	Isu/Permasalahan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
	<p>DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian barat, Sulawesi Tengah bagian barat, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian timur, dan sebagian Papua.</p> <p>2) Wilayah yang akan mengalami musim hujan lebih basah dari normalnya adalah sebagian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian selatan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur bagian barat hingga selatan, Sulawesi, Maluku Utara bagian barat, Pulau Seram bagian selatan, dan Papua bagian selatan.</p> <p>c. Perkembangan La Nina 2021/2022:</p> <p>1) Hasil pemantauan BMKG hingga awal Oktober 2021 terhadap anomali suhu permukaan laut di Samudera Pasifik Ekuator menunjukkan indikasi akan terjadi fenomena La Nina dengan intensitas lemah hingga moderat yang dapat memicu peningkatan curah hujan. Anomali iklim La Nina diperkirakan akan berkembang terus hingga mencapai intensitas sedang hingga Februari 2022. Selanjutnya, puncak musim hujan juga diprediksi akan dominan terjadi pada Januari-Februari 2022.</p> <p>2) Meskipun dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia, pada Oktober-November 2021, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera; dan</p> <p>3) Pada Desember 2021 hingga Februari 2022, peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Jawa, Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua.</p> <p>d. Peningkatan curah hujan seiring dengan masuknya awal musim hujan dan peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.</p>	

B. Realisasi Anggaran



Gambar 4 : Tren Persentase Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Dijelaskan pada Tabel 6, besaran pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00, dengan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran maka pagu anggaran Asisten Deputi Perhubungan dan Pekerjaan Umum direvisi menjadi Rp552.953.000,00 (turun 30,89%). Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 hingga 2021, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 2021 paling tinggi yaitu hanya sebesar 98,99%. Akan tetapi, perlu menjadi catatan bahwa besaran realisasi tersebut tergolong tinggi karena adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan pada awal tahun 2020 tidak dapat terlaksana dan harus dilaksanakan secara virtual (tidak menggunakan anggaran).

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dalam Laporan Kinerja ini Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum melakukan analisa Evaluasi Kinerja Anggaran³ sebagai salah satu sumber daya yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dan digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Tabel 11 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

RO	Target	Realisasi	Persentase Capaian Masing-Masing RO	Capaian RO Satuan Kerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1 Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	27	40	148,15%	136,57%	485.878.000	480.588.772	98,91%	46,35%*
2 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	8	10	125,00%		67.075.000	66.800.000	99,59%	

³ Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran

Berdasarkan penghitungan, diperoleh nilai Efisiensi sebesar 46,35% dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dimana nilai Efisiensi berada diantara -20% sampai dengan 20%. Nilai Efisiensi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum melebihi 20% maka dalam penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, dapat disimpulkan digunakan secara efisien.

Formulir *Checklist* Muatan Substansi Laporan Kinerja Sesuai Surat Edaran
Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018

Asdep: Asdep 3

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	v
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	v
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	v
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	v
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	v
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	v
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	v
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	v

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi